

ABSTRAK

Prinsip *Good governance* dalam penyaluran bantuan sosial tunai berupa transparansi dan efektivitas. Penyaluran bantuan sosial tunai merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan pada Keputusan Menteri Sosial Nomor Republik Indonesia Nomor 86/HUK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019. Tujuan Penulisan Hukum ini tentang permasalahan mengenai bagaimana implementasi prinsip *Good Governance* dalam penyaluran bantuan sosial tunai di Kelurahan Kadilangu, beserta dengan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyaluran bantuan sosial tunai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data primer yang merupakan hasil dari wawancara serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, Transparansi yang dilakukan oleh Kelurahan Kadilangu yakni pemerintah desa melakukan proses pendataan bagi calon penerima bantuan sosial tunai, pendataan dilihat dari kriteria yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan pendataan ini berlaku transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keefektivitasan penyaluran bantuan sosial tunai efektif karena masyarakat merasakan adanya kebaikan dari pelaksanaan bantuan tersebut yang ditandai dengan rasa aman dari segi perasaan, lingkungan, dan manfaat. Program BST ini dapat membantu masyarakat mencukupi kebutuhan sehari-hari selama pandemi *Covid-19*. Selanjutnya, dijelaskan mengenai faktor pendukung meliputi interaksi sosial melalui sosialisasi dengan perwakilan dari setiap desa yakni ketua RT, terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat, serta sumber daya yang berkompeten. Akan tetapi, pada saat penyaluran bantuan sosial tunai di Kelurahan Kadilangu terdapat beberapa kendala, seperti terdapat data ganda, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, dan dokumen yang tidak lengkap.

Kata Kunci: Prinsip *Good Governance*, Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, Pandemi *Covid-19*.

ABSTRACT

The principles of good governance in the distribution of cash social assistance include transparency and effectiveness. The distribution of cash social assistance is a program issued by the Ministry of Social Affairs based on the Decree of the Minister of Social Affairs Number of the Republic of Indonesia Number 86/HUK/2020 concerning Amendments to the Decree of the Minister of Social Affairs Number 54/HUK/2020 concerning Implementation of Basic Food Social Assistance and Cash Social Assistance in Handling the Impact of Corona Virus Disease 2019. The purpose of writing this law is about the problem of how to implement the principles of good governance in the distribution of cash social assistance in the Kadilangu Village, along with the supporting factors and inhibiting factors in the distribution of cash social assistance.

The method used in this study is empirical juridical with qualitative analysis. The research specifications used are analytical descriptive. The data used is primary data which is the result of interviews as well as secondary data which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, the transparency carried out by the Kadilangu Village, namely the village government, carried out the data collection process for prospective cash social assistance recipients. The data collection was seen from predetermined criteria so that the implementation of this data collection was transparent, fair, and legally accountable. The effectiveness of the distribution of cash social assistance is effective because the community feels that there is goodness from the implementation of this assistance which is marked by a sense of security in terms of feelings, environment, and benefits. This BST program can help people meet their daily needs during the Covid-19 pandemic. Furthermore, it explains the supporting factors including social interaction through socialization with representatives from each village, namely the RT head, the establishment of good communication between the village government and the community, as well as competent resources. However, during the distribution of cash social assistance in the Kadilangu Village, there were several obstacles, such as duplicate data, lack of public awareness, and incomplete documents.

Keywords: Principles of Good Governance, Distribution of Cash Social Assistance, Covid-19 Pandemic.